

PEREMPUAN, AGAMA, DAN PARTAI POLITIK

Oleh: Dra. Latifah Iskandar (Anggota FPAN DPR RI)

A. Landasan Pikir

Keterwakilan perempuan sangat penting untuk memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan perempuan yang lebih bisa dimengerti oleh perempuan sendiri, misalnya dalam hal - hal :

1. Isu-isu kesehatan reproduksi, seperti cara KB yang aman.
2. Isu-isu kesejahteraan keluarga, seperti harga sembilan bahan pokok yang terjangkau, masalah kesehatan dan pendidikan anak.
3. Isu-isu kepedulian terhadap anak, kelompok usia lanjut dan tuna daksa.
4. Isu-isu kekerasan seksual.

Data di masa lalu yang menempatkan perempuan sebagai:

- Korban pemerkosaan:
1997: 299 buah kasus
1998: 338 buah kasus
1999: 488 buah kasus
Korban pemerkosaan dalam jangka tahun 1997 s.d. 1999 meningkat 44,4%
- Korban pelecehan seksual:
1997: 46 buah kasus
1998: 50 buah kasus
1999: 150 buah kasus
Korban pelecehan seksual dalam jangka tahun 1997 s.d. 1999 meningkat 200%.

B. Perempuan dalam Perspektif Agama

- Agama menjadi salah satu penghambat perempuan berperan dalam politik muncul karena teks-teks keagamaan, baik al-Qur'an maupun hadis

dipahami secara literal. Misalnya dalam kasus pembagian warisan dan poligami.

- Semangat moral Islam sesungguhnya adalah mengangkat derajat perempuan dan menempatkannya sejajar dengan posisi laki-laki. Untuk menangkap ini, diperlukan metodologi yang tepat, yakni dengan memahami konteks sosio-historis ayat dan hadis muncul/datang. Karena itu diperlukan pemahaman yang komprehensif tentang asbabun nuzul dan asbabu wurud al-hadits.
- Ketidaktepatan dalam interpretasi teks-teks keagamaan ini terjadi karena ketidakmemadaiannya wawasan sang penafsir untuk menangkap pesan moral teks-teks keagamaan karena penguasaan terhadap asbab al-nuzul/wurud sangat minim. Ditambah lagi dengan fakta bahwa ulama di masa awal Islam sangat didominasi oleh laki-laki.

C. Perempuan dalam Partai Politik

- Ketidaktepatan pemahaman keagamaan telah menyebabkan kesenjangan, ketidakadilan, dan disparitas gender. Dan pemahaman dan konstruksi sosial tersebut, lebih lanjut berpengaruh terhadap peran-peran perempuan dalam masyarakat, termasuk peran politik.
- Peran politik perempuan terhambat karena konstruksi sosial yang telah lama terbangun menempatkan perempuan dalam wilayah-wilayah domestik, dan laki-laki ada dalam wilayah-wilayah publik. Peran domestik yang sejak lama dilekatkan kepada perempuan, telah menyebabkan perempuan menjadi makhluk lemah dalam aspek sosial dan ekonomi. Perempuan dalam konteks ini menjadi “pekerja yang tak terlihat” (*invisible workers*). Padahal dalam demokrasi liberal, faktor sosial dan ekonomi adalah faktor yang sangat penting dalam meraih dukungan.
- Minimnya perempuan dalam lembaga yang sangat strategis dalam mengambil kebijakan ini, membuat perempuan tidak mempunyai akses yang lebih luas dan daya tawar yang kuat untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berorientasi dan ramah kepada perempuan.